

**PENGARUH PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF
DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGARAN
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Azhari S, Kamaliah dan Jaka Hendrawan

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRAK

This study aims to look at the Effects of Preventive Monitoring, Surveillance Detective and Performance Based Budgeting Budgetary Control Effectiveness Against Empirical Study on Kuantan Singingi district offices. The population in this study are all within the district government offices Kuantan Singingi, Riau province, amounting to 29 offices. While the sample is employees who participate in the budgetary participation Kuantan Singingi District Government as a whole, amounting to 97 people. To test the hypothesis of the study used multiple regression analysis method with the help of SPSS software. The results show that preventive control does not significantly influence the effectiveness of budgetary control with a significance value of $0.124 > 0.05$. While the detective monitoring and performance-based budgeting significantly influence the effectiveness of budgetary control with empirical studies in the Kuantan Singingi district offices with significance $0.000 < 0.05$. Donations effect of preventive monitoring, supervision and performance-based budgeting detective on the effectiveness of budgetary control with empirical studies in the Kuantan Singingi district offices by 52.9%.

Kata Kunci : *Effect of Preventive Monitoring, Surveillance Detective, Performance Based Budgeting and Budgetary Control Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Dengan adanya otonomi memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan melakukan pembaharuan sistem keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten.

Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (PP Nomor 20 Tahun 2001). Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran

Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118). Untuk mengetahui pengendalian terhadap anggaran tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya maka hal tersebut dengan diukur dengan efektivitas. Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, kabupaten kuantan singingi ibu kotannya berkedudukan di Taluk Kuantan Pada Kabupaten. Pada tahun 2012, tingkat realisasi anggaran dari setiap SKPD pada Kuantan Singingi dinilai masih banyak yang tidak mencapai target. Data tingkat pencapaian realisasi anggaran dapat diperoleh dari informasi yang dipublikasikan pada media masa. Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi tingkat realisasi anggaran rata-rata pada setiap SKPD yang ada berkisar pada angka 80 %. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif maupun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Disamping itu BPK RI juga menemukan bahwa terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya adalah (1) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum membuat peraturan teknis terkait pengelolaan dan manajemen kas; (2) Pengelolaan kas non anggaran belum di diharapkan tetapkan dengan peraturan Bupati; dan (3) Proses penyusunan dan penetapan APBD dan APBD Perubahan tidak tepat waktu

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012 dalam pengendalian Anggaran belumlah mencapai efektifitas sebagaimana yang diharapkan. Revrison (2000:118) menjelaskan bahwa pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Untuk tercapainya efektifitas pengendalian anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat menggunakan pengawasan preventif, pengawasan detektif serta mengembangkan penganggaran berbasis kinerja.

Untuk tercapainya efektifitas pengendalian anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat menggunakan pengawasan preventif, pengawasan detektif serta mengembangkan penganggaran berbasis kinerja.

Efektifitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian merupakan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengadakan tindakan perbaikan bila perlu, agar apa yang direncanakan perusahaan sesuai dengan realisasinya dan akhirnya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrisond, 2000:118).

Disamping itu Pendlebury (2000) menjelaskan bahwa pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Salah satu upaya tersebut adalah pengawasan.

Pengawasan Preventif

Menurut Refrisond (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002: 95) mengatakan bahwa pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan dan biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan sebelum terjadinya. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif, karena lebih ekonomis dan lebih baik daripada mendeteksi dan mengkoreksi pemasalahan yang telah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi. Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Detektif

Menurut Revrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang sudah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya. Pengawasan jenis ini cenderung bersifat pasif, karena pengawasan tidak berhubungan secara langsung dengan objek yang diperiksa. Pengawasan ini juga memiliki kelemahan yang mendasar. Bukti-bukti yang diperiksa seringkali hanya diperhatikan aspek formalnya, sedangkan aspek materialnya yaitu mengenai akurasi bukti itu yang dibandingkan dengan barang yang telah dibeli atau kegiatan yang telah dibiayai, cenderung terabaikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan di tempat berlangsungnya pekerjaan atau di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi. Pemeriksaan dalam hal ini tidak hanya dilakukan terhadap bukti-bukti penerimaan atau bukti pengeluaran, tetapi dilanjutkan terhadap akurasi bukti-bukti tersebut secara material. Kelemahan utama dari pengawasan ini adalah kemungkinan kolusi antara aparat pengawasan dengan pihak yang sedang diawasi. Hal ini dimungkinkan karena sebelum melaksanakan tugas, biasanya petugas pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai waktu pengawasan, kepada instansi yang akan diperiksa. Sehingga instansi yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan menertibkan administrasi keuangannya

Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa "anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran". Sementara menurut Bastian (2006) "anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang".

Baik Mardiasmo (2002) maupun Bastian (2006) menyatakan bahwa anggaran memiliki batas waktu. Hal ini untuk memudahkan para pihak yang berkompeten dalam penyusunan anggaran dalam melakukan estimasi yang akurat serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran.

Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Secara konseptual, definisi penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Secara teori anggaran berbasis kinerja menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan. Melalui proses anggaran kinerja, pemerintah kota/kabupaten menetapkan keluaran dan hasil dari masing-masing program dan pelayanan kemudian pemerintah daerah membuat target pencapaiannya. Usul anggaran dipresentasikan oleh Walikota/bupati kepada DPRD berdasarkan target yang telah diproyeksikan tersebut. Data perbandingan memungkinkan DPRD untuk memahami hasil yang akan dicapai melalui tingkatan pengeluaran yang berbeda. Dengan demikian pengeluaran dapat diprioritaskan dan unit kerja dapat bertanggung jawab terhadap hasil. Penerapan anggaran berbasis Kinerja memerlukan perubahan pola pikir dan orientasi dari inputs ke outputs oriented.

Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh.

Sedangkan pengertian pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin bagus pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, maka semakin bagus pula pelaksanaan anggaran agar menjamin tujuan dapat tercapai dengan menghindari penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, jadi dengan demikian pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap pengendalian anggaran. Kaitan antara Pengawasan Prventif dengan efektifitas pengendalian anggaran telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Fuadi (2013) Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kota Bukittinggi dan Arif Fajri (2009) yang menemukan bahwa pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian

Pengawasan detektif sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta pengawasan setektif sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Dengan demikian bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Hubungan antara Pengawasan detektif dan pengendalian anggaran ini telah dibuktikan oleh pemnelitian yang dilakukan oleh Arif Fajri 2009 dan Arif Fuadi tahun 2013 yang menemukan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran

Anggaran kinerja berbasis kinerja menurut Halim (2007) adalah merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Menurut Mardiasmo (2002:28) anggaran kiera adalah sistem anggaran yang mengutamakan keapda upaya penciptaan hasil kinerja atau *outopu* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran, dalam hal ini anggaran berbasis kinerja dengan suatu cara yang memperlihatkan secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan kepada individu atau departemen untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

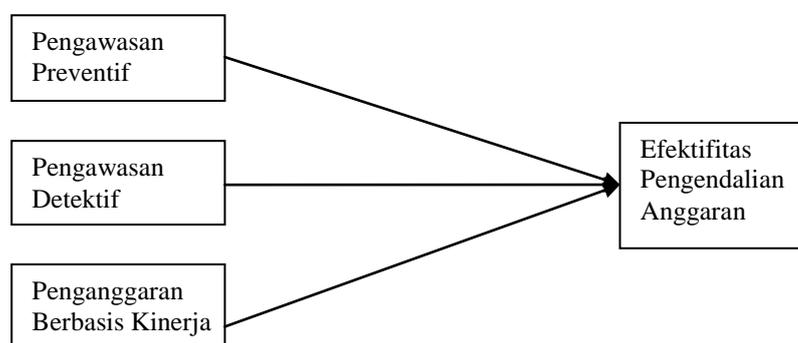
Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, oleh karena itu anggaran berbasis kinerja digunakan sebagai alat pencapaian tujuan dan pengendalian yang didasarkan pada efektivitas anggaran.

Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara *input*, *output* dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terwujud tanggungjawab (*akuntability*) dan keterbukaan (*transparancy*) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Model Penelitian

Pengaruh antara pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut :

Gambar : Model Penelitian



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- H₂ : Pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- H₃ : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Kuesioner penelitian ini disebar ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan pada penulis dalam waktu sebulan.

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel (*sample*) yaitu anggota populasi yang disebut dengan elemen populasi (Indriantoro, 2002).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Jumlah SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 29 SKPD. Sampel penelitian ini adalah golongan dari eselon II, III Dan IV yang bertugas di Instansi Pemerintah daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari data yang ada jumlah 29 SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi a sebanyak 29 SKPD dan setiap SKPD diberikan 5 kuesiner sehingga jumlah kuesioner yang di edarkan adalah sebanyak 145 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menyebarkan kuesiner sebanyak 145 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 112 kuesioner , dan sebanyak 33 kuesioner tidak mendapat respon dan atau tidak dikembalikan. Dari kuesioner yang kembali, sebanyak 15 kuesioner tidak dapat dianalisis, dan yang dapat dianalisis sebanyak 97 keusioner Untuk melihat lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Karakteristik Responden

Untuk melihat responden berdasarkan karakteristik tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 : Identitas Responden

Karakteristik	F	%
Jenis Kelamin		
1, Laki-laki	64	65,98
2, Perempuan	33	34,02
Jumlah	97	100,00
Usia		
≤ 30 Tahun	8	8,25
30-49 Tahun	42	43,30
≥ 50 Tahun	47	48,45
Jumlah	97	100,00
Pendidikan		
SMA	2	2,06
Diploma	13	13,40
Sarjana	63	64,95
Magister	21	21,65
Jumlah	97	100,00
Masa Kerja		
< 10 tahun	22	22,68
10-20 tahun	54	55,67
> 20 tahun	21	21,65
Jumlah	97	100,00

Sumber : Data Hasil Olahan, 2014

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 5 % untuk uji 2 sisi. Jika r hitung $>$ r tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika r hitung \leq r tabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid. Nilai r tabel dapat diperoleh dengan persamaan $N - 2 = 97 - 2 = 95 = 0,200$.

Dan r hitung diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,534 – 0,670	0,200	Valid
Pengawasan Preventif	0,481 – 0,772	0,200	Valid
Pengawasan Detektif	0,439 – 0,633	0,200	Valid
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,346 – 0,785	0,200	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Sama halnya dengan pengujian validitas, pengujian reabilitas juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cornbarh's Alpha*. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisoner yang digunakan sebagai indikator dari variabel. Jika koefisien alpha yang dihasilkan $\geq 0,6$, maka indikator tersebut dikatakan reliable atau dapat dipercaya.

Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas

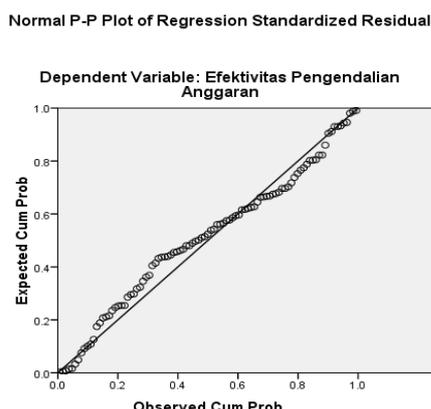
Variabel	Standar Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,6	0.706	Reliabel
Pengawasan Preventif	0,6	0.878	Reliabel
Pengawasan Detektif	0,6	0.614	Reliabel
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,6	0.880	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dengan melihat *probability plot*. Uji secara *probability plot* adalah dengan melihat data pada garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 2. Grafik Normal Probability P-Plot



Sumber : Data Hasil Olahan, 2014

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat grafik *Normal Probability P-Plot*. Dari gambar diatas terlihat titik-titik mengikuti garis diagonal. Berdasarnya gambar tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikoliniertasi bisa dilihat berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengawasan Preventif	0,987	1,013
Pengawasan Detektif	0,871	1,148
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,871	1,148

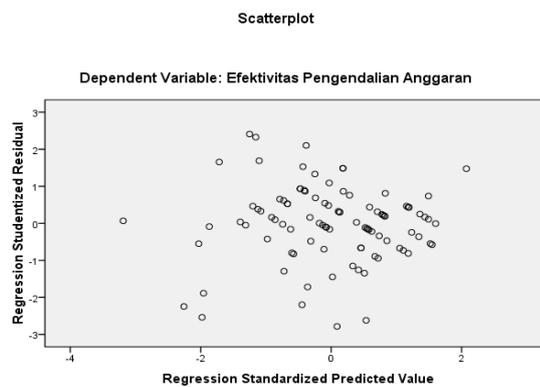
Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,013; 1,148 dan 1,148 < 10 dan *tolerance* sebesar 0,987; 0,871 dan 0,871 > 0,10. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *SRESID* dengan residual error yaitu *ZPRED*. Jika tidak ada pola tertentu dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot* ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3. Grafik Scatterplot



Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Gambar diatas menunjukkan bahwa data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi bila nilai DW berada diantara -2 sampai dengan 2.

Tabel 5 : Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Lower	Upper
1,712	-2	+2

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa $-2 < DW < +2 = -2 < 1,712 < +2$. Maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6 : Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.
	B	SE	Beta
1 (Constant)	2.217	2.845	
Pengawasan Preventif	.046	.030	.111
Pengawasan Detektif	.524	.088	.457
Penganggaran Berbasis Kinerja	.130	.025	.401

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 2,217 + 0,046 X_1 + 0,524 X_2 + 0,130 X_3 + e$$

Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menggunakan uji t. Caranya adalah dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, namun jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Adapun nilai t tabel pada penelitian ini (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan persamaan:

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= n - k - 1 ; \alpha/2 \\ &= 97 - 3 - 1 ; 0,05/2 \\ &= 93 ; 0,025 \\ &= 1,986 \end{aligned}$$

Sedangkan nilai t hitung untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji pertama sebagai berikut :

Tabel 7 : Hasil Uji Hipotesis Pertama

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.		
		B	SE	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.217	2.845		.780	.438
	Pengawasan Preventif	.046	.030	.111	1.551	.124

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung variabel pengawasan preventif sebesar $1,551 < 1,986$ dan signifikansi $0,124 > 0,05$. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan tidak membuktikan keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) yang menemukan bahwa pengawasan sebelum dilaksanakan dapat membuktikan keberhasilan suatu kegiatan dan program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tidak terbuktinya pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran sebagaimana yang ditemukan Oleh BPK terdapatnya kelemahan dari Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya adalah (1) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum membuat peraturan teknis terkait pengelolaan dan manajemen kas; (2) Pengelolaan kas non anggaran belum di diharapkan tetapkan dengan peraturan Bupati; dan (3) Proses penyusunan dan penetapan APBD dan APBD Perubahan tidak tepat waktu

Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Tujuan penelitian ini, untuk menguji Pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji hipotesis pertama sebagai berikut :

Tabel 8 : Hasil Uji Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.		
		B	SE	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.217	2.845		.780	.438
	Pengawasan Detektif	.524	.088	.457	5.985	.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel 8 dapat dilihat nilai t hitung variabel pengawasan detektif sebesar 5,985 > 1,986 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian maka pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada $\alpha < 0,05$

Pengawasan detektif merupakan pengawasan dari jauh yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, beserta bukti-bukti pendukungnya dan pengawasan yang dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dapat membuktikan meningkatkan keberhasilan suatu kegiatan dan program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013). Yang menemukan bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengujian Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian yang diujikan yaitu Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji hipotesis pertama sebagai berikut :

Tabel 9 : Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Model		Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.	Unstand. Coeff.	
		B	SE	B	t	Sig.
1	(Constant)	2.217	2.845		.780	.438
	Penganggaran Berbasis Kinerja	.130	.025	.401	5.258	.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung variabel penganggaran berbasis kinerja sebesar $5,258 > 1,986$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis diterima. Artinya penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Salawali (2013). Yang menemukan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Sistem penganggaran yang berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematis. dapat membuktikan meningkatkan keberhasilan suatu kegiatan dan program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$ maka Pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, Namun jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil pengujian simultan sebagai berikut :

Tabel 10 : Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275.135	3	91.712	34.785	.000 ^a
	Residual	245.195	93	2.637		
	Total	520.330	96			

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas diketahui F hitung sebesar 34,785 dengan signifikansi 0,000. Diketahui F tabel (pada tingkat signifikansi 5%) dengan persamaan $n - k - 1$; $k = 97 - 3 - 1$; $3 = 93$; $3 = 2,703$. Dengan demikian diketahui F hitung (34,785) > F tabel (2,703) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya adalah bahwa pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan adalah untuk melihat sumbangan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut :

Tabel 4.16 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.529	.514	1.62373

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai R^2 sebesar 0,529. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 52,9 %. Sedangkan sisanya sebesar 47,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah menganalisis pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Implikasi dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kuantan Singingi untuk dapat mempertahankan efektivitas pengendalian anggarannya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran sudah tergolong baik.
2. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengawasan detektif mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu diharapkan kepada SKPD agar senantiasa melakukan pengawasan detektif pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi
3. Penelitian hanya membahas pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri Arif. (2009). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah.
- Fuadi Arif. (2013). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kota Bukittinggi).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

- Porter, Thomas, (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Revrisond Baswir. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Widjaja Gunawan. (2002). *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.